

BAB IV

PEMBAHASAN

Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, maka dalam bab ini akan dibahas: (i) struktur perekonomian Jawa Timur; (ii) kebijakan pembangunan pada RPJMD Propinsi Jawa Timur; (iii) strategi dan struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur; (iv) struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base*; dan (v) analisis kesesuaian antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base*.

4.1 Struktur Perekonomian Jawa Timur

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur berdasarkan atas harga konstan tahun 2000 pada tahun 2000 mencapai Rp.202,83 triliun dan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga pada tahun 2006 mencapai Rp.271,25 triliun. Terlihat dari PDRB Jawa Timur tahun 2000-2006 (lihat lampiran), terdapat tiga sektor yang paling menonjol di Jawa Timur yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan dan Sektor Pertanian. Ketiga sektor ini selalu menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun dan selalu menjadi sektor yang paling menonjol di dalam PDRB Jawa Timur.

Pertumbuhan PDRB dari tahun 2000-2006 selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun sebesar 4.97% dan selama enam tahun (2000-2006) PDRB Jawa Timur mengalami pertumbuhan sebesar 29,81%. Meskipun Total PDRB Jawa Timur tahun 2006 mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,04% dari tahun 2005, akan tetapi Total PDRB Jawa Timur tetap mengalami kenaikan sebesar Rp.728 miliar dibandingkan dari tahun 2004 ke 2005. Untuk

lebih jelasnya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan dapat dilihat di lampiran dan pertumbuhan masing-masing sektor di Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1: **Pertumbuhan Sektoral PDRB Jawa Timur Tahun 2001-2006 (Persen)**

No	Sektor	Pertumbuhan						Rata-rata
		2001	2002	2003	2004	2005	2006	
1.	Pertanian	1.26%	2.02%	1.91%	2.82%	3.16%	3.99%	2.53%
2.	Pertambangan & Penggalian	2.68%	2.76%	2.21%	1.84%	9.32%	8.58%	4.57%
3.	Industri	2.35%	-0.73%	4.46%	5.28%	4.61%	3.05%	3.17%
4.	Listrik, Gas, dan Air Bersih	-14.63%	18.64%	15.52%	14.86%	6.18%	4.07%	7.44%
5.	Konstruksi	0.89%	1.10%	1.86%	1.85%	3.48%	1.42%	1.77%
6.	Perdagangan, Hotel & Rstrn.	8.08%	8.32%	7.92%	9.25%	9.15%	9.62%	8.72%
7.	Angkutan & Komunikasi	2.03%	13.03%	5.78%	6.77%	5.00%	6.77%	6.56%
8.	Keuangan, Persewaan & Jasa	14.01%	3.39%	2.12%	5.94%	7.49%	7.46%	6.74%
9.	Jasa-Jasa	3.11%	3.95%	3.41%	3.44%	4.23%	5.27%	3.90%
PDRB		3.76%	3.80%	4.78%	5.83%	5.84%	5.80%	4.97%

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, PDRB Prop. Jawa Timur 2000-2004 & 2002-2006, data diolah

Jika dilihat berdasarkan kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur, juga terdapat tiga sektor ekonomi yang mempunyai kontribusi menonjol di Propinsi Jawa Timur periode tahun 2000-2006 yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Pertanian. Untuk lebih

jelasan, kontribusi sektoral terhadap PDRB Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2: **Distribusi Persentase PDRB Jawa Timur Atas Dasar Harga Konstan'00 Tahun 2000-2006 (Juta Rupiah)**

	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian	19.74	19.26	18.93	18.41	17.89	17.44	17.14
2	Pertambangan & Penggalian	2.06	2.04	2.02	1.97	1.90	1.96	3.01
3	Industri	29.79	29.39	28.11	28.02	27.87	27.55	26.83
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.53	1.57	1.44	1.59	1.72	1.73	1.70
5	Konstruksi	4.01	3.90	3.80	3.69	3.55	3.47	3.33
6	Perdagangan, Hotel & Rstrn.	24.39	25.41	26.52	27.31	28.19	29.08	30.13
7	Angkutan & Komunikasi	5.23	5.15	5.61	5.66	5.71	5.66	5.72
8	Keuangan, Persewaan & Jasa	4.60	4.70	4.99	4.86	4.86	4.94	5.02
9	Jasa-Jasa	8.64	8.59	8.60	8.49	8.30	8.17	8.13
	Jumlah	100.00						

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, PDRB Prop. Jawa Timur 2000-2004 & 2002-2006

Dari tabel 4.2 di atas terlihat bahwa Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran memang menduduki peringkat pertama dengan kontribusi sebesar 30.13% terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2006 dan meningkat 5,74% dari tahun 2000 yang kontribusinya sebesar 24,39%. Sektor ini juga menunjukkan kenaikan terus menerus selama enam tahun terhadap total PDRB Jawa Timur yang pada tahun 2000 mencapai Rp.49,48 triliun dan pada tahun 2006 mencapai Rp.81,72 triliun (lihat lampiran). Tidak hanya di dalam PDRB total, sektor

perdagangan, hotel dan restoran juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar dari tahun 2000-2006. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2000 sebesar 8,08% dan meningkat pertumbuhannya sehingga pada tahun 2006 mencapai 9,62% (lihat tabel 4.1). Secara rata-rata per tahunnya, pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran ini sebesar 8,72% (pertumbuhan paling besar dibandingkan 8 sektor lainnya).

Dari tabel 4.2 di atas, untuk sektor pertanian jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2000-2006 dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2000 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur sebesar 19,74% dan pada tahun 2006 kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur turun sebesar 2,6% sehingga kontribusi sektor pertanian hanya sebesar 17,14%. Turunnya kontribusi sektor pertanian ini disebabkan oleh turunnya kontribusi sub-sektor tanaman bahan makanan dan sub-sektor kehutanan yang sudah banyak kehilangan lahan potensialnya (lahan semakin sempit dan penggundulan hutan). Akan tetapi dengan kontribusi yang turun setiap tahunnya, sektor pertanian masih mampu meningkatkan jumlah PDRB totalnya dari tahun ke tahun (lihat lampiran).

Pada tahun 2000 sektor pertanian memiliki PDRB total sebesar Rp.40,03 triliun dan tahun 2006 meningkat menjadi Rp.46,49 triliun. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian tahun 2000 sebesar 1,26%, hanya mengalami penurunan pada tahun 2003 sehingga menjadi 1,91% dari tahun 2002 sebesar 2,02% dan mulai meningkat dari tahun 2004 (2,82%) sampai tahun 2006 (3,99%) yang pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,53%. Hal ini baik untuk kebutuhan dan ketahanan pangan Propinsi Jawa Timur dan dapat mendukung industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri) dengan memasok input yang dibutuhkan oleh agroindustri di Jawa Timur.

Untuk sektor industri pengolahan, dilihat dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur cenderung turun dari tahun 2000 sebesar 29,79% hingga pada tahun 2006 kontribusinya terhadap PDRB Jawa Timur hanya sebesar 26,83% atau kontribusinya turun sebesar 2,96% selama enam tahun. Akan tetapi kontribusi sektor industri pengolahan masih lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan struktural di Propinsi Jawa Timur dari sektor pertanian menuju ke sektor industri pengolahan ataupun sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami fluktuasi karena adanya krisis pada tahun 1998 yang belum dapat sembuh sepenuhnya dan terpukul lagi oleh naiknya harga BBM pada tahun 2005 akibat adanya pengurangan subsidi BBM oleh pemerintah yang mengakibatkan pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan dari tahun 2004 sebesar 5,28% menjadi sebesar 4,61% pada tahun 2005 (lihat tabel 4.1). Akan tetapi, sektor industri pengolahan masih mampu meningkatkan jumlah total PDRB terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2006 sebesar Rp.72,79 triliun dari tahun 2004 yang hanya sebesar Rp.67,52 triliun (lihat lampiran).

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Timur menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, karena kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur terhadap PDB Nasional relatif lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan propinsi-propinsi lainnya di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Berita Resmi Statistik No. 09/IX/15 Februari 2006, PDRB Jawa Timur berkontribusi sebesar 15,07% terhadap PDB Nasional, atau memiliki kontribusi terbesar kedua terhadap PDB Nasional setelah DKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi propinsi Jawa Timur menurut BPS Propinsi

Jawa Timur pada tahun 2001 hingga tahun 2006 adalah berturut-turut sebesar 3,33%, 3,41%, 4,11%, 5,43%, 5,84%, dan 5,80%.

Di samping itu Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar di sektor industri pengolahan; sektor pertanian; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, karena kontribusi ketiga sektor tersebut selalu mendominasi PDRB Propinsi Jawa Timur, sehingga bisa menjadi *trigger* (penggerak) bagi sektor-sektor yang lainnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Propinsi Jawa Timur.

4.2 Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibahas di dalam sub bab ini merupakan ringkasan dari RPJMD Propinsi Jawa Timur tahun 2006-2008. Yang akan dibahas pada sub bab ini meliputi: (i) kinerja dan permasalahan pembangunan; dan (ii) kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur.

4.2.1 Kinerja dan Permasalahan Pembangunan

Secara umum kinerja perekonomian Jawa Timur yang sampai dengan tahun 2004 relatif fluktuatif, hal ini direpresentasikan oleh indikator aggregate pertumbuhan ekonomi yang sejak krisis tahun 1998 mengalami kontraksi hingga -16,12% terus mengalami percepatan sebesar 4,11% pada tahun 2003 dan pada tahun 2004 meningkat menjadi 5,43 %. Pertumbuhan pada 2004 ini melebihi target pertumbuhan diakhir tahun 2004 yaitu sebesar 4,8%. Pertumbuhan tahun 2004 didorong oleh seluruh sektor yang semuanya mengalami pertumbuhan, terutama sektor industri yang sudah tumbuh sebesar 4,14%, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,48%, dan sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 13,15%, sedangkan sektor konstruksi juga sudah mulai tumbuh

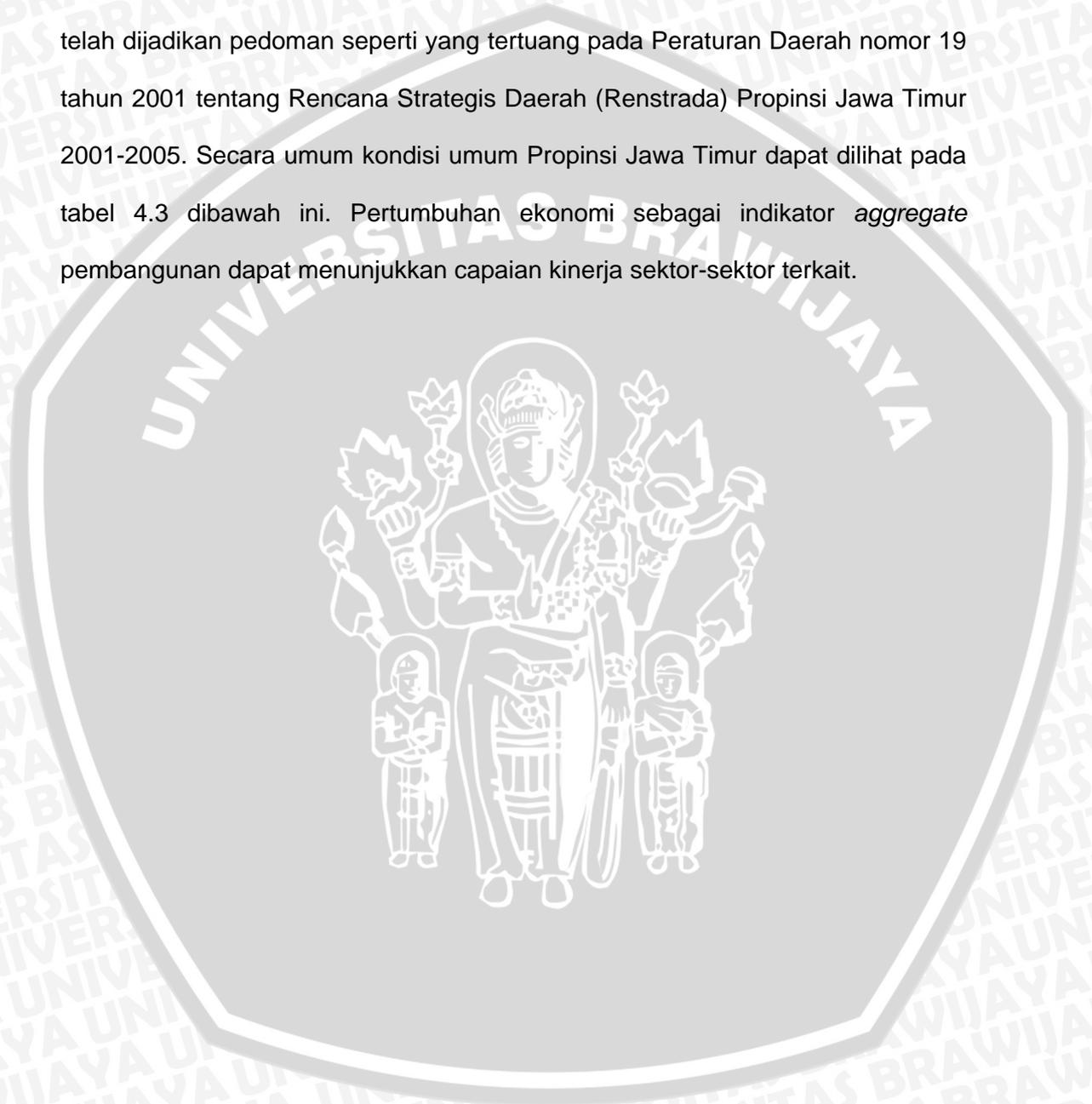
sebesar 1,63%. Dengan performa pertumbuhan tersebut, kontribusi terbesar masih didominasi oleh sektor-sektor lama yaitu sektor industri pengolahan sebesar 24,62%, sektor perdagangan, hotel dan restoran 24,21% dan sektor pertanian 16,47%.

Performa kinerja perekonomian Jawa Timur sampai saat ini sebenarnya telah menunjukkan adanya transformasi struktur dari sektor primer ke sektor sekunder, namun transformasi struktur ini masih semu dikarenakan belum diikuti oleh mobilitas tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebagai ilustrasi, bahwa dominasi kontribusi perekonomian sektor industri yang mencapai 24,62% hanya menyerap 12,19% dari tenaga kerja yang ada, sedangkan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian sebesar 16,47%, tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencapai 48,83%. Fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Jawa Timur, bahkan untuk negara besar seperti Amerika Serikat, transformasi ekonomi baru terjadi selama 80 tahun. Kondisi tersebut juga menggambarkan bahwa perlu pengembangan SDM tenaga kerja untuk mampu melakukan mobilisasi ke sektor industri. Namun demikian, bukan berarti bahwa tenaga kerja di sektor pertanian hanya memerlukan keahlian dan ketrampilan yang rendah, justru dengan konsep pembangunan modern, sektor pertanian harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai, sehingga akan menghasilkan output yang tinggi.

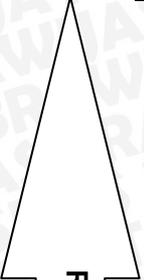
Selanjutnya berkaitan dengan proyek-proyek strategis di Jawa Timur, seperti pembangunan Jembatan Nasional Suramadu, pembangunan jaringan jalan lintas selatan Jawa Timur, dan Pembangunan Pasar Induk Agrobisnis, walaupun sejak tahun 2002 sudah mulai ditangani, namun perkembangannya masih perlu dipacu lagi terutama menyangkut pendanaan yang cukup besar. Keberadaan infrastruktur ekonomi ini, secara signifikan akan berpengaruh terhadap perkembangan sosial-ekonomi masyarakat pada masa mendatang,

terutama pada percepatan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

Kinerja Pemerintah Propinsi Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2004 dapat dikatakan berhasil, hal ini apabila diukur dengan indikator *aggregate* yang telah dijadikan pedoman seperti yang tertuang pada Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2001 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Jawa Timur 2001-2005. Secara umum kondisi umum Propinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator *aggregate* pembangunan dapat menunjukkan capaian kinerja sektor-sektor terkait.



Tabel 4.3: **Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita, 2004 (konstan 1993)**

 <p>Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur (5,43)</p>	<p>Kuadran I Daerah potensial untuk maju</p> <p>Kota Batu</p>	<p>Kuadran II Daerah berkembang (maju)</p> <p>Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Gresik Kota Blitar Kota Malang Kota Pasuruan Kota Surabaya</p>
	<p>Kuadran IV Daerah tertinggal</p> <p>Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo, Kab. Probolinggo, Kab. Mojokerto, Kab. Jombang, Kab. Nganjuk, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ngawi, Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. Bangkalan, Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep</p>	<p>Kuadran III Daerah potensial untuk tumbuh (berkembang)</p> <p>Kota Kediri Kota Probolinggo Kota Mojokerto Kota Madiun</p>
<p>Rata-Rata PDRB Per Kapita (Rp 7,88 juta)</p> 		

Sumber: BPS Propinsi Jawa Timur, 2004 (diolah)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, daerah-daerah yang ada di kuadran I menggambarkan daerah dengan PDRB per kapita rendah, tetapi mampu mencapai pertumbuhan tinggi. Hal ini terjadi pada Kota Batu, dimana daerah ini merupakan daerah yang mampu mencapai pertumbuhan yang tinggi dengan didukung oleh sektor jasa (khususnya pariwisata, hotel dan restaurant) serta pertanian. Perkembangan sektor jasa dan pertanian di Kota Batu sebagian besar selain unik (keunggulan lokasi/daya saing) juga karena dukungan infrastruktur

yang sudah cukup baik, sehingga hal ini menjadikan Kota Batu sebagai daerah potensial untuk maju.

Daerah-daerah yang ada di kuadran II merupakan daerah-daerah yang sudah berkembang/maju (daerah tumbuh cepat). Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di daerah-daerah yang ada di Kuadran II menggambarkan dukungan sektor industri yang cukup tinggi dimana perkembangan sektor industri ini sangat didukung oleh kecukupan infrastruktur yang cukup baik. Dari hasil studi JICA menunjukkan bahwa sekitar 90% industri yang ada di Jawa Timur berada di Jawa Timur bagian Utara. Hal ini dikarenakan fasilitas yang ada sudah cukup menunjang.

Daerah-daerah di Kuadran III menunjukkan PDRB per kapita yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Daerah-daerah yang ada di Kuadran ini merupakan daerah yang potensial untuk tumbuh (berkembang). Daerah dengan ciri kuadran III, sebagian besar adalah daerah perkotaan, dimana jumlah penduduk tidak terlalu tinggi.

Daerah kuadran IV merupakan ciri-ciri daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi rendah serta PDRB per kapita rendah. Daerah-daerah yang ada di kuadran ini merupakan daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi dan IPM yang rendah, sehingga juga bisa dikatakan bahwa daerah-daerah di kuadran ini merupakan daerah yang tertinggal.

Masih banyaknya daerah-daerah yang ada di kuadran IV (daerah-daerah yang tertinggal) tersebut ternyata menimbulkan permasalahan pembangunan, yaitu permasalahan disparitas antar wilayah. Semakin banyak daerah yang ada di kuadran IV, maka semakin besar ketimpangan antar wilayah yang terjadi di Jawa Timur. Ketimpangan antar wilayah di Jawa Timur sangat besar, karena terdapat 26 daerah dari total 38 daerah yang ada di Jawa Timur masih berada di kuadran IV, berarti ada lebih dari separuh daerah-daerah yang ada di Jawa

Timur masih menjadi daerah tertinggal. Besarnya ketimpangan antar wilayah ini mengindikasikan masih tingginya angka kemiskinan yang ada di daerah-daerah di Jawa Timur, khususnya di daerah tertinggal ini. Permasalahan disparitas tersebut dapat diatasi dengan mengembangkan daerah-daerah di kuadran IV tersebut agar dapat menjadi daerah potensial, atau jika mungkin dapat menjadi daerah yang maju.

4.2.2 Kebijakan Pembangunan Wilayah Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur

Kebijakan pembangunan dalam 3 tahun kedepan yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dengan fokus UMKM serta pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, pada hakekatnya juga mengandung nilai-nilai pembangunan sosiokultural masyarakat. Strategi pembangunan dalam ekonomi pembangunan memberikan gambaran bahwa antara pertumbuhan dan pemerataan selalu menghasilkan *trade-off*, artinya jika menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka pemerataan harus dirugikan. Profil strategi pertumbuhan dalam RPJMD ini adalah yang berbasis UMKM yang notabene merupakan sektor usaha yang menjadi bagian terbesar dari mata pencaharian masyarakat, sehingga hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang atau usaha besar, tetapi justru terdistribusi pada segmen masyarakat menengah dan bawah. Walaupun sampai saat ini konsumsi masih mendominasi struktur pertumbuhan, namun demikian tiga tahun kedepan, diharapkan dapat diupayakan percepatan investasi baik yang berfasilitas maupun non-fasilitas untuk mendukung fundamental ekonomi Jawa Timur khususnya pada perkembangan sektor UMKM.

Maka kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur meliputi (i) pemenuhan kebutuhan dasar rakyat; (ii)

kebijakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan; dan (iii) peningkatan aksesibilitas masyarakat.

Kebijakan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat merupakan kebijakan pembangunan yang paling pokok, seperti (1) Pemenuhan hak atas pangan; (2) Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan; (3) Pemenuhan hak atas pendidikan; (4) Pemenuhan hak atas pekerjaan dan usaha; (5) Pemenuhan hak atas perumahan; (6) Pemenuhan hak atas air bersih dan sanitasi; (7) Pemenuhan hak atas tanah; (8) Pemenuhan hak atas sumberdaya alam dan lingkungan hidup; (9) Pemenuhan hak atas rasa aman; dan (10) Pemenuhan hak untuk berpartisipasi.

Dalam upaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dapat ditempuh melalui: (1) peningkatan investasi, perdagangan dan pariwisata; (2) pengembangan industri manufaktur; (3) pengembangan koperasi dan UMKM; (4) pengelolaan BUMD; dan (5) revitalisasi pertanian.

Tiga tahun kedepan upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terutama diprioritaskan terhadap upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pangan, pendidikan yang berkualitas, dan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Upaya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat meliputi 3 aspek penting, yaitu (1) aspek menghormati hak-hak dasar masyarakat, (2) aspek melindungi hak-hak dasar masyarakat, (3) aspek pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Agar pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan dapat terwujud, begitu pula untuk terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Jawa Timur, maka perlu ditunjang dengan percepatan terealisasinya infrastruktur, seperti: Jembatan Suramadu, tuntasnya Jalan Lintas Selatan, pembangunan jalan-jalan tol baru, beroperasinya Bandara Udara Internasional Juanda,

dibukanya Bandara Udara Abdul Rahman Saleh di Malang, pendirian Pasar Induk Agrobisnis di Desa Jemundo Kabupaten Sidoarjo, pendirian pusat pengolahan limbah industri serta Terminal Kayu di Cerme Kabupaten Gresik, pembangunan Terminal Peti Kemas di Kabupaten Bangkalan, realisasi proyek air bersih Umbulan, dan lain-lain. Disamping infrastruktur ekonomi, perlu fasilitasi pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti air bersih, sanitasi, infrastruktur kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

4.3 Strategi dan Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur

Peningkatan investasi yang berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat merupakan strategi untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Jawa Timur, sehingga diharapkan pertumbuhan yang terjadi akan mampu mendukung terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, seperti kebutuhan akan pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Sedangkan struktur pengembangan wilayah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang diperuntukkan bagi semua daerah di Jawa Timur, kecuali daerah yang berbasis pertanian. Hal ini dikarenakan daerah yang berbasis pertanian sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar penduduknya terhadap pangan dari hasil komoditas pertaniannya sendiri tanpa memerlukan bantuan dari daerah lain, dan bukan tidak mungkin juga bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terhadap pangan di daerah lain yang membutuhkan dengan mengekspor hasil komoditas pertaniannya ke daerah yang membutuhkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebutuhan dasar masyarakat antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya bisa berbeda. Ada daerah yang membutuhkan tambahan prasarana pendidikan dan kesehatan

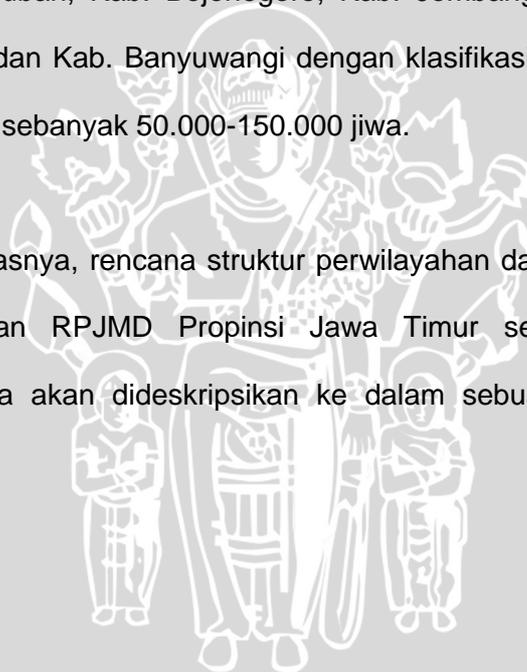
karena prasarana yang dimiliki tidak memadai, dan ada daerah yang tidak membutuhkan tambahan prasarana pendidikan dan kesehatan karena prasarana yang dimiliki sudah memadai. Namun, RPJMD Propinsi Jawa Timur secara faktual tidak menetapkan daerah-daerah yang berbasis prasarana dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

Dual track strategy (strategi pembangunan yang pro-pertumbuhan dan pro-pemerataan) merupakan strategi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan, artinya jika menginginkan pertumbuhan yang tinggi, maka hasil-hasil pertumbuhan tersebut harus merata di semua daerah di Jawa Timur. Jadi hasil pertumbuhan tidak hanya dinikmati oleh daerah-daerah yang sudah maju dan berkembang saja, tetapi juga terdistribusi pada daerah-daerah yang tertinggal. Struktur pengembangan wilayah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan adalah dengan terbentuknya rencana struktur perwilayahan Jawa Timur, dimana wilayah Jawa Timur dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Kawasan Andalan (KADAL) yang memiliki sektor prioritas, kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, dan kawasan tertinggal.

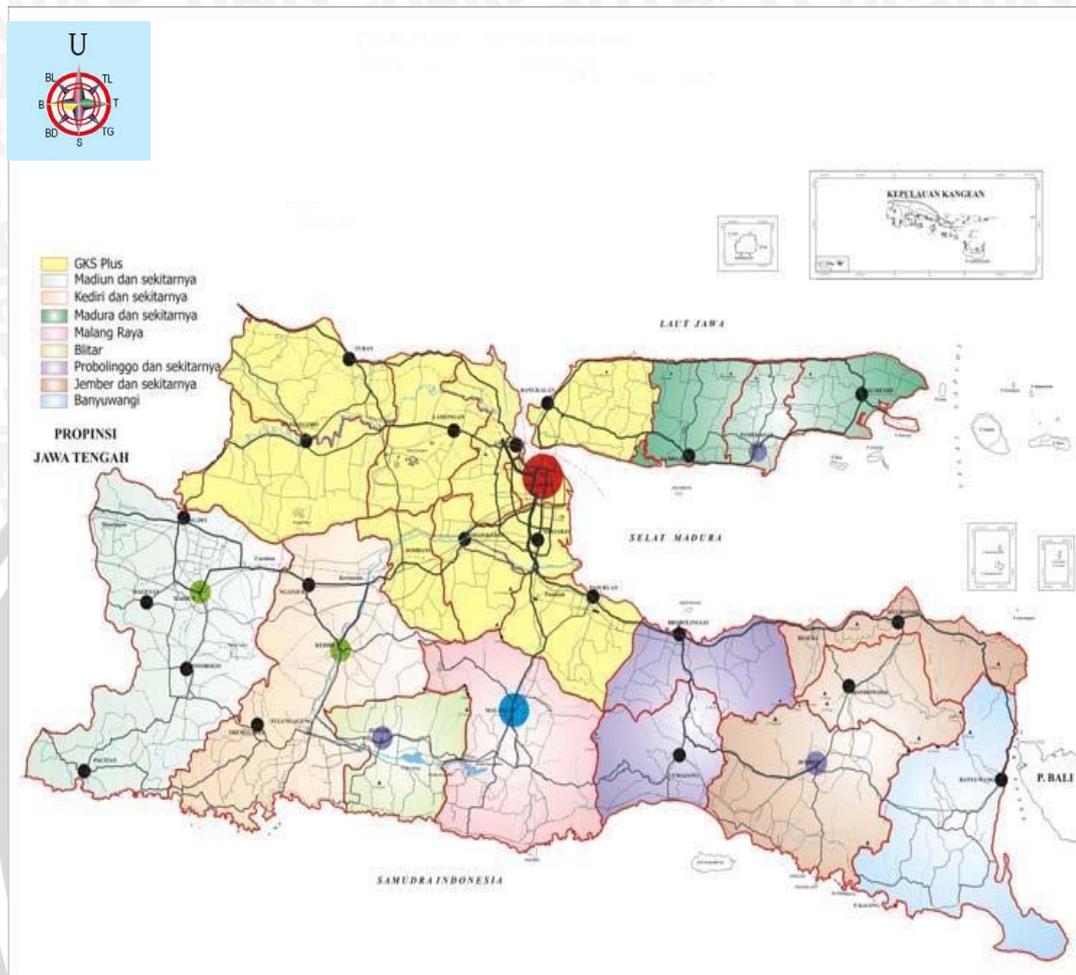
Peningkatan dan perbaikan infrastruktur merupakan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Sedangkan struktur pengembangan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat adalah dengan penentuan orde perkotaan Jawa Timur. Penentuan orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur didasarkan atas variabel jumlah penduduk perkotaan. Variabel jumlah penduduk yang digunakan karena jika jumlah penduduk di suatu daerah semakin banyak, maka kebutuhan akan fasilitas umum juga semakin tinggi. Tingkatan orde tersebut adalah sebagai berikut:

- Orde I : Kota Surabaya dengan klasifikasi jumlah penduduk terbanyak sekitar 7 juta jiwa.
- Orde IIA : Kota Malang dengan klasifikasi jumlah penduduk sebanyak 1-1,5 juta jiwa.
- Orde IIB : Kota Madiun dan Kota Kediri dengan klasifikasi jumlah penduduk sebanyak 0,5-1 juta jiwa.
- Orde IIIA : Kota Blitar, Kab. Jember dan Kab. Pamekasan dengan klasifikasi jumlah penduduk sebanyak 150.000-500.000 jiwa dan menjadi wilayah potensial berkembang.
- Orde IIIB : Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kab. Banyuwangi dengan klasifikasi jumlah penduduk paling sedikit, yaitu sebanyak 50.000-150.000 jiwa.

Untuk lebih jelasnya, rencana struktur perwilayahan dan penentuan orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur seperti yang telah dijelaskan sebelumnya akan dideskripsikan ke dalam sebuah gambar (peta) seperti berikut ini:



Gambar 4.1: **Pembagian Wilayah Jawa Timur Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur**



Sumber: RPJMD Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008

Pada gambar 4.1 diatas, berdasarkan pola dan kecenderungan perkembangan perubahan struktur perkotaan yang antara lain dipengaruhi oleh jumlah penduduk perkotaan, kelengkapan fasilitas dan perkembangan ekonomi wilayah di Jawa Timur maka wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 9 kawasan yang didasarkan pada keterkaitan potensi daerah. Kawasan-kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gerbangkertasusila Plus : Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten

- Lamongan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kab. Jombang.
- b. Madiun dan sekitarnya (dsk) : Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan.
 - c. Kediri dsk : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek.
 - d. Madura dsk : Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep.
 - e. Malang Raya : Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu.
 - f. Blitar dsk : Kota Blitar, Kab. Blitar.
 - g. Probolinggo dsk : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang.
 - h. Jember dsk : Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo.
 - i. Banyuwangi dsk : Kab. Banyuwangi.

Berdasarkan pembagian wilayah Jawa Timur tersebut, maka kawasan strategis (potensial) yang perlu mendapatkan perhatian sebagai wilayah prioritas pembangunan adalah Kawasan Andalan (KADAL) yang meliputi kawasan Gerbangkertosusila, Tuban dsk, Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Probolinggo dsk. Sedangkan sektor-sektor yang menjadi prioritas di Kawasan Andalan tersebut meliputi:

- Sektor pertanian diprioritaskan di kawasan Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Tuban dsk.
- Holtikultura (subsektor tanaman bahan makanan) diprioritaskan di kawasan Malang dsk, dan Probolinggo dsk.
- Perkebunan (subsektor tanaman perkebunan) diprioritaskan di kawasan Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Probolinggo dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Tuban dsk.

- Perikanan (subsektor perikanan) diprioritaskan di kawasan Gerbangkertosusila, Madiun dsk, Kediri dsk, Probolinggo dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Tuban dsk.
- Sektor pertambangan (migas/non migas) diprioritaskan di kawasan Gerbangkertosusila, Probolinggo dsk, Jember dsk, dan Banyuwangi dsk.
- Pertambangan golongan C (subsektor penggalian) diprioritaskan di kawasan Madiun dsk, Kediri dsk, dan Tuban dsk.
- Sektor industri diprioritaskan di kawasan Gerbangkertosusila, Malang dsk, dan Tuban dsk.
- Pemukiman (sektor konstruksi/bangunan) diprioritaskan di kawasan Gerbangkertosusila.
- Pariwisata (subsektor jasa hiburan dan rekreasi/kebudayaan) diprioritaskan di kawasan Gerbangkertosusila, Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Probolinggo dsk, Jember dsk, dan Banyuwangi dsk.

Untuk kurun waktu 2006-2008 penataan dan pengembangan kawasan ini akan difokuskan pada Gerbangkertosusila, Tuban dsk dan Probolinggo dsk. Pengembangan kawasan prospektif diarahkan pada kawasan Pantai Utara Jawa dan Kawasan Kaki Jembatan Suramadu. Adapun untuk pengembangan wilayah tertinggal diarahkan pada wilayah Selatan Jawa Timur dan Madura serta Kepulauan.

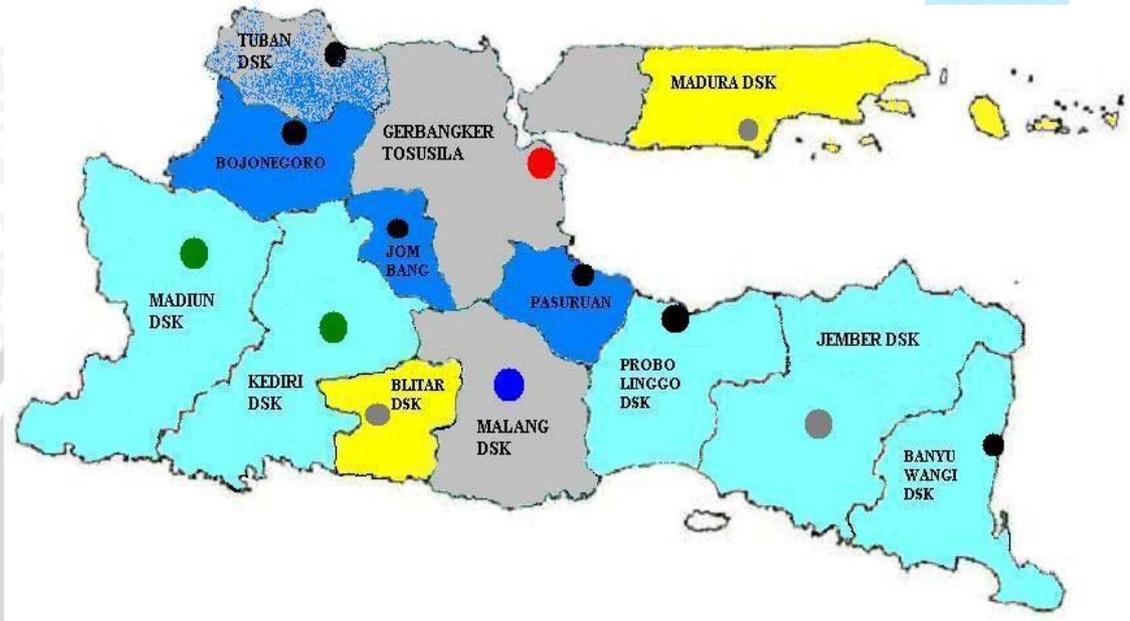
Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa kawasan-kawasan di Propinsi Jawa Timur dapat dikelompokkan menjadi tiga kawasan, yaitu:

1. Kawasan Andalan (KADAL)
 - a. Gerbangkertosusila : Kab. Gresik, Kab. Bangkalan, Kota Mojokerto, Kab. Mojokerto, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Lamongan.

- b. Madiun dsk : Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan.
 - c. Kediri dsk : Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek.
 - d. Probolinggo dsk : Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang.
 - e. Malang dsk : Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu.
 - f. Jember dsk : Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo.
 - g. Banyuwangi dsk : Kab. Banyuwangi.
 - h. Tuban dsk : Kab. Tuban.
2. Kawasan di sekitar Gerbangkertosusila
 - a. Pasuruan dsk : Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan.
 - b. Kab. Bojonegoro
 - c. Kab. Jombang
 3. Kawasan tertinggal
 - a. Madura dsk : Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, Kab. Sumenep.
 - b. Blitar dsk : Kota Blitar, Kab. Blitar.

Berdasarkan pengelompokan kawasan diatas, rencana struktur perwilayahan Jawa Timur dapat ditentukan. Maka rencana struktur perwilayahan Jawa Timur berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2: Rencana Struktur Perwilayahan Jawa Timur Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur



- Kawasan Andalan (KADAL) untuk Daerah Industri
- Kawasan Andalan (KADAL) untuk Daerah Pertanian
- Kawasan di sekitar Gerbangkertosusila
- Kawasan Tertinggal

- Orde I : Kota Surabaya
- Orde IIA : Kota Malang
- Orde IIB : Kota Kediri, Kota Madiun
- Orde IIIA : Kota Blitar, Kab. Jember, Kab. Pamekasan
- Orde IIIB : Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Banyuwangi



Berdasarkan gambar 4.2 diatas, kawasan Jawa Timur meliputi Kawasan Andalan dan kawasan tertinggal. Kawasan Blitar dsk dan Madura dsk merupakan kawasan tertinggal, dan selebihnya merupakan Kawasan Andalan. Kawasan Andalan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kawasan Gerbangkertosusila, kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, dan kawasan di luar Gerbangkertosusila. Kawasan Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri. Semua kawasan di sekitar Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor pertanian, kecuali kawasan Pasuruan dsk yang pola pemanfaatannya berupa sektor industri. Semua kawasan di luar Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor pertanian, kecuali kawasan Malang dsk dan Tuban dsk yang merupakan *resources base* dan memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri. Kawasan Malang dsk memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri yang berbasiskan sektor pertanian. Sedangkan kawasan Tuban dsk memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri yang berbasiskan sektor pertambangan.

Akan tetapi, penentuan orde perkotaan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada variabel jumlah penduduk tidak konsisten dan mengalami bias struktur keterkaitan antar wilayah, karena orde perkotaan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur tidak bisa menjelaskan keterkaitan wilayah (aksesibilitas) dan arus barang antar daerah.

4.4 Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan Analisis *Economic Base*

Merujuk pada kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah yang tertuang dalam RPJMD Propinsi Jawa Timur, diasumsikan bahwa kebijakan pembangunan dan strategi pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* adalah sama dengan yang tertuang di RPJMD Propinsi Jawa Timur.

Identifikasi daerah-daerah yang kelebihan (mencukupi) dan kekurangan pangan, prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan prasarana lainnya merupakan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur terhadap pangan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Daerah yang kelebihan (mencukupi) dan kekurangan kebutuhan dasar tersebut dapat diketahui dengan mengidentifikasi daerah yang berbasis pertanian (pangan) dan daerah yang berbasis prasarana. Identifikasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode LQ dengan pendekatan ekonomi untuk mengetahui daerah-daerah yang kelebihan dan kekurangan pangan, dan metode LQ dengan pendekatan sosial untuk mengetahui daerah-daerah yang kelebihan (mencukupi) dan kekurangan prasarana pendidikan, kesehatan dan prasarana lainnya. Daerah yang berbasis pertanian (pangan) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur terhadap pangan. Sedangkan daerah yang berbasis prasarana berarti daerah tersebut tidak membutuhkan tambahan prasarana lagi karena prasarana yang ada sudah memadai untuk kebutuhan penduduk daerah tersebut. Akan tetapi, identifikasi basis dengan pendekatan sosial tidak dapat dimasukkan ke dalam struktur tata ruang. Meskipun tidak dapat dimasukkan ke dalam struktur tata ruang, tetapi pemenuhan kebutuhan dasar tersebut masih bisa diestimasi, misalnya dengan teknik penghitungan basis pendidikan (dengan menggunakan variabel tingkat pendidikan rata-rata, rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat sekolah, banyaknya sekolah, jumlah guru, jumlah murid, angka buta huruf, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah), teknik penghitungan basis kesehatan (dengan menggunakan variabel rasio mortalitas, angka kematian bayi, angka harapan hidup, banyaknya rumah sakit/puskesmas, banyaknya tenaga medis), dan teknik penghitungan basis dengan pendekatan sosial lainnya.

Pembentukan daerah-daerah pusat pertumbuhan (*growth pole*) dengan menetapkan rencana struktur perwilayahan Jawa Timur merupakan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base* untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan. Rencana struktur perwilayahan Jawa Timur berdasarkan analisis *economic base* membagi wilayah Jawa Timur menjadi empat kawasan yaitu Kawasan Andalan (KADAL), kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, kawasan pertanian yang potensial dan kawasan tertinggal. Penentuan daerah pusat pertumbuhan yang ada pada masing-masing kawasan dapat dilihat dari PDRB per kapita daerahnya. Suatu daerah dapat menjadi daerah pusat pertumbuhan jika memiliki PDRB per kapita tertinggi di kawasan dimana daerah tersebut menjadi bagiannya. Daerah pusat pertumbuhan tersebut diharapkan bisa memberikan *spread effect* pada daerah-daerah di sekitarnya, dalam arti suatu daerah pusat pertumbuhan juga harus bisa mengembangkan dan menjadi *growth pole* (pusat pertumbuhan) bagi daerah-daerah di sekitarnya.

Penentuan orde perkotaan Jawa Timur berdasarkan analisis *economic base* merupakan struktur pengembangan wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Penentuan orde perkotaan ini tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk saja, tetapi juga didasarkan pada keterkaitan pembangunan daerah (aksesibilitas), arus barang antar daerah, dan pusat pertumbuhan (*growth pole*). Maka tingkatan ordenya adalah sebagai berikut:

- Orde I : Kota Surabaya yang merupakan daerah berbasis industri dan berperan sebagai *growth pole* (pusat pertumbuhan) Jawa Timur.
- Orde IIA : Kota Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Jombang, dimana ketiga daerah ini berada di dekat pusat pertumbuhan Jawa Timur

(Kota Surabaya) dan menjadi penunjang bagi daerah-daerah di kawasan Gerbangkertosusila.

- Orde IIB : Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Sumenep yang merupakan daerah-daerah yang memiliki keterkaitan arus barang secara langsung dengan daerah-daerah di orde IIA.
- Orde IIIA : Kota Blitar yang mana merupakan daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan Jawa Timur (Kota Surabaya), sehingga dalam keterkaitan arus barangnya, daerah ini harus melewati daerah-daerah di orde IIB (khususnya kawasan Kediri dan Malang) dan IIA terlebih dahulu sebelum akhirnya dapat menyalurkan barangnya ke Kota Surabaya (orde I). Dalam arti, daerah ini sangat bergantung pada kawasan Kediri dsk dan Malang dsk.

4.4.1 Identifikasi Sektor Basis Berdasarkan Satuan PDRB

Berikut ini merupakan sektor basis pada tiap kota dan kabupaten di Jawa Timur berdasarkan satuan PDRB (selengkapnya bisa dilihat di lampiran):

a. Sektor pertanian

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
- Kota : Batu.

b. Sektor pertambangan dan penggalian

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Probolinggo,

Jombang, Nganjuk, Madiun, Bojonegoro, Tuban, Gresik, Sampang, dan Sumenep.

c. Sektor industri

- Kabupaten : Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Gresik.
- Kota : Kediri, Malang, dan Surabaya.

d. Sektor listrik, gas dan air bersih

- Kabupaten : Pasuruan, Tuban, dan Gresik.
- Kota : Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.

e. Sektor konstruksi

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Lumajang, Probolinggo, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Gresik, Bangkalan, dan Pamekasan.
- Kota : Blitar, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.

f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

- Kabupaten : Tulungagung, Situbondo, Jombang, Nganjuk, Ngawi, dan Lamongan.
- Kota : Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Surabaya, dan Batu.

g. Sektor pengangkutan dan komunikasi

- Kabupaten : Sidoarjo, Jombang, dan Bangkalan.
- Kota : Blitar, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.

h. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Ngawi, Bojonegoro, dan Pamekasan.
- Kota : Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.

i. Sektor jasa

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.
- Kota : Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Batu.

4.4.2 Identifikasi Sektor Basis Berdasarkan Satuan Jumlah Tenaga Kerja

Berikut ini merupakan sektor basis pada tiap kota dan kabupaten di Jawa Timur berdasarkan satuan jumlah tenaga kerja (selengkapnya bisa dilihat di lampiran):

a. Sektor pertanian

- Kabupaten : Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep.

b. Sektor pertambangan dan penggalian

- Kabupaten : Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Bondowoso, Mojokerto, Jombang, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep.
- Kota : Kediri.

c. Sektor industri

- Kabupaten : Trenggalek, Tulungagung, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, dan Gresik.
- Kota : Kediri, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto dan Surabaya.

- d. Sektor listrik, gas dan air bersih
- Kabupaten : Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Magetan, dan Gresik.
 - Kota : Kediri, Blitar, Malang, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, dan Surabaya.
- e. Sektor konstruksi
- Kabupaten : Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, dan Madiun.
 - Kota : Blitar, Malang, Probolinggo, Mojokerto, Surabaya, dan Batu.
- f. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
- Kabupaten : Kediri, Malang, Sidoarjo, Jombang, dan Nganjuk.
 - Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu.
- g. Sektor pengangkutan dan komunikasi
- Kabupaten : Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Jombang, Tuban, Gresik, Bangkalan, dan Sampang.
 - Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu.
- h. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
- Kabupaten : Tulungagung, Kediri, Sidoarjo, Jombang, dan Pamekasan.
 - Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu.
- i. Sektor jasa
- Kabupaten : Tulungagung, Kediri, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, dan Gresik.

- Kota : Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Pasuruan, Mojokerto, Madiun, Surabaya, dan Batu.

4.4.3 Perbandingan Pencapaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Basis

Untuk mengetahui pencapaian pertumbuhan ekonomi dan sektor basis di tiap kota dan kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2005, berikut akan disajikan tabel perbandingan (pemetaan) capaian pertumbuhan ekonomi dan sektor basis berdasarkan satuan PDRB dan satuan jumlah tenaga kerja yang akan menentukan daerah prioritas pembangunan (selengkapnya dapat dilihat di lampiran). Namun, perbandingannya hanya difokuskan pada daerah tumbuh cepat yang ada di kuadran II (pertumbuhan ekonomi tinggi dan nilai $LQ > 1$) dan daerah potensial yang ada di kuadran III (pertumbuhan ekonomi rendah dan nilai $LQ > 1$) karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah prioritas pembangunan. Sektor basis yang dibandingkan hanya mencakup tiga sektor utama yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Jawa Timur, yaitu sektor pertanian; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Daerah tumbuh cepat yang ada di kuadran II akan menjadi daerah pusat pertumbuhan (*growth pole*) di tiap kawasan dan sektor yang terkait.

Tabel 4.4: Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Basis, 2005

Tipe Daerah	Sektor Pertanian		Sektor Industri		Sektor Perdagangan	
	PDRB	Tenaga Kerja	PDRB	Tenaga Kerja	PDRB	Tenaga Kerja
Daerah tumbuh cepat - pertumbuhan ekonomi tinggi - LQ > 1 (basis)	Kab. Malang Kab. Jember Kab. Pasuruan Kab. Mojokerto Kab. Tuban Kota Batu	Kab. Malang Kab. Jember Kab. Tuban	Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Gresik Kota Malang Kota Surabaya	Kab. Pasuruan Kab. Sidoarjo Kab. Mojokerto Kab. Gresik Kota Malang Kota Probolinggo Kota Surabaya	Kota Malang Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Batu	Kab. Malang Kab. Sidoarjo Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu
Daerah potensial - pertumbuhan ekonomi rendah - LQ > 1 (basis)	Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Lamongan Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep	Kab. Pacitan Kab. Ponorogo Kab. Trenggalek Kab. Blitar Kab. Kediri Kab. Lumajang Kab. Banyuwangi Kab. Bondowoso Kab. Situbondo Kab. Probolinggo Kab. Nganjuk Kab. Madiun Kab. Magetan Kab. Ngawi Kab. Bojonegoro Kab. Lamongan Kab. Bangkalan Kab. Sampang Kab. Pamekasan Kab. Sumenep	Kota Kediri	Kab. Trenggalek Kab. Tulungagung Kab. Jombang Kota Kediri Kota Pasuruan Kota Mojokerto	Kab. Tulungagung Kab. Situbondo Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kab. Ngawi Kab. Lamongan Kota Pasuruan Kota Mojokerto	Kab. Kediri Kab. Jombang Kab. Nganjuk Kota Kediri Kota Pasuruan Kota Mojokerto

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, maka pencapaian pertumbuhan ekonomi dan sektor basis pada daerah-daerah potensial dan tumbuh cepat di Jawa Timur dapat dijelaskan seperti berikut ini:

a. Sektor pertanian

➤ Satuan PDRB

Daerah-daerah tumbuh cepat menggambarkan bahwa output dari sektor pertanian di daerah-daerah tersebut relatif tinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, sehingga kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut juga tinggi dan dapat mengangkat perekonomian daerah. Daerah-daerah ini membutuhkan perhatian yang cukup besar karena daerah-daerah ini bisa menjadi pusat pertumbuhan untuk sektor pertanian. Dalam arti, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah ini memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan mengangkat perekonomian Jawa Timur, khususnya di sektor pertanian.

Sedangkan daerah-daerah potensial menggambarkan bahwa output dari sektor pertanian di daerah-daerah tersebut relatif tinggi, namun belum bisa berkontribusi terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan, karena output di sektor lainnya relatif rendah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut relatif rendah juga. Dengan kata lain, pertumbuhan yang tinggi di sektor pertanian tidak diikuti oleh sektor yang lain. Daerah-daerah ini harus mendapat perhatian yang cukup, karena daerah-daerah ini merupakan daerah-daerah berbasis pertanian yang potensial.

➤ Satuan jumlah tenaga kerja

Daerah tumbuh cepat dan daerah potensial merupakan daerah yang memiliki basis di sektor pertanian, dan komoditas pertaniannya memiliki *added value* tinggi. Dengan kondisi seperti itu, daerah-daerah ini memiliki persentase

jumlah tenaga kerja di sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan persentase rata-rata jumlah tenaga kerja sektor pertanian di Jawa Timur, sehingga komoditas pertanian yang diproduksi juga lebih banyak.

b. Sektor industri

➤ Satuan PDRB

Daerah-daerah tumbuh cepat menggambarkan bahwa output dari sektor industri pengolahan di daerah-daerah tersebut sangat tinggi daripada output sektor yang lain, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut juga tinggi dan dapat mengangkat perekonomian daerah. Daerah-daerah tersebut bisa menjadi pusat pertumbuhan untuk sektor industri pengolahan di Jawa Timur. Dalam arti, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah ini memiliki kontribusi yang besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan mengangkat perekonomian Jawa Timur, khususnya di sektor industri pengolahan, karena industri-industri besar yang berbasis ekspor dan perusahaan-perusahaan multinasional terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut dan telah membentuk *cluster* industri. Hal ini menghasilkan hubungan positif terhadap penyerapan tenaga kerja di daerah-daerah tersebut. Hal ini terjadi karena investasi langsung berupa ekspansi/pelebaran usaha yang masuk ke Jawa Timur banyak yang terkonsentrasi di daerah-daerah tersebut, karena daerah-daerah tersebut memberikan beberapa kemudahan, seperti kemudahan akses, infrastruktur yang lengkap, dan tempat yang strategis karena secara tidak langsung daerah-daerah tersebut berdekatan dengan pusat penggerak perekonomian Jawa Timur yaitu Kota Surabaya, sehingga secara tidak langsung daerah-daerah tersebut mendapat *spread effect* dari Kota Surabaya, atau dengan kata lain terjadi proses aglomerasi.

Sedangkan daerah potensial menggambarkan bahwa output dari sektor industri pengolahan di daerah-daerah tersebut sudah tinggi karena industri-industri yang ada di daerah-daerah tersebut merupakan industri besar. Namun hal itu belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, karena output di sektor lainnya relatif rendah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut relatif rendah juga. Seperti halnya Kota Kediri, yang merupakan satu-satunya daerah yang menjadi daerah potensial industri di Jawa Timur berdasarkan satuan PDRB. Laju pertumbuhan PDRB Kota Kediri hanya digerakkan oleh sektor industri pengolahan, atau dengan kata lain perekonomian daerahnya hanya ditopang oleh sektor industri pengolahan. Hal ini terjadi karena pertumbuhan yang tinggi di sektor industri pengolahan tidak diikuti oleh sektor yang lain. Daerah ini harus mendapat perhatian yang cukup, karena daerah-daerah ini merupakan daerah-daerah berbasis industri yang potensial.

➤ Satuan jumlah tenaga kerja

Daerah tumbuh cepat dan daerah potensial memiliki persentase jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan relatif lebih besar dibandingkan dengan persentase rata-rata jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan di Jawa Timur karena daerah-daerah ini merupakan daerah industri baik industri besar atau industri kecil, sehingga output yang diproduksi juga lebih banyak.

c. Sektor perdagangan, hotel dan restoran

➤ Satuan PDRB

Daerah-daerah tumbuh cepat menggambarkan daerah-daerah yang sektor perdagangan, hotel dan restorannya maju, dimana persentase nilai output dari sektor perdagangan, hotel dan restoran di daerah-daerah tersebut relatif lebih tinggi dari persentase rata-rata nilai output sektor perdagangan, hotel dan

restoran di Jawa Timur, sehingga sektor perdagangan, hotel dan restoran di daerah-daerah tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan dapat mengangkat perekonomian daerah. Seperti halnya pada Kota Batu yang mana merupakan kota wisata, sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDRBnya karena di Kota Batu terdapat banyak hotel dan restoran, dan tingkat okupansi hotel dan tingkat kunjungan ke restoran juga relatif tinggi. Atau dengan kata lain, perekonomian daerahnya sebagian besar ditopang oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran.

Sedangkan daerah-daerah potensial menggambarkan bahwa persentase nilai output dari sektor perdagangan, hotel dan restoran di daerah-daerah tersebut sudah tinggi jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nilai output Jawa Timur untuk sektor yang sama. Namun hal itu belum bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi, karena nilai output di sektor lainnya relatif lebih rendah sehingga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah tersebut relatif rendah juga.

➤ Satuan jumlah tenaga kerja

Daerah-daerah tumbuh cepat memiliki persentase jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran relatif lebih besar dibandingkan dengan persentase rata-rata jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran di Jawa Timur. Sektor perdagangan, hotel dan restoran di daerah-daerah ini memang memberikan kontribusi yang relatif besar terhadap PDRB daerah, sehingga sektor ini menjadi basis di daerah-daerah ini.

Daerah-daerah potensial merupakan daerah-daerah dengan basis industri (Kota Kediri), basis pertanian (Kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Nganjuk) dan basis *utility* (Kota Pasuruan dan Kota Mojokerto). Daerah-daerah

ini memiliki persentase jumlah tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran lebih besar dibandingkan dengan persentase rata-rata jumlah tenaga kerja sektor perdagangan, hotel dan restoran di Jawa Timur.

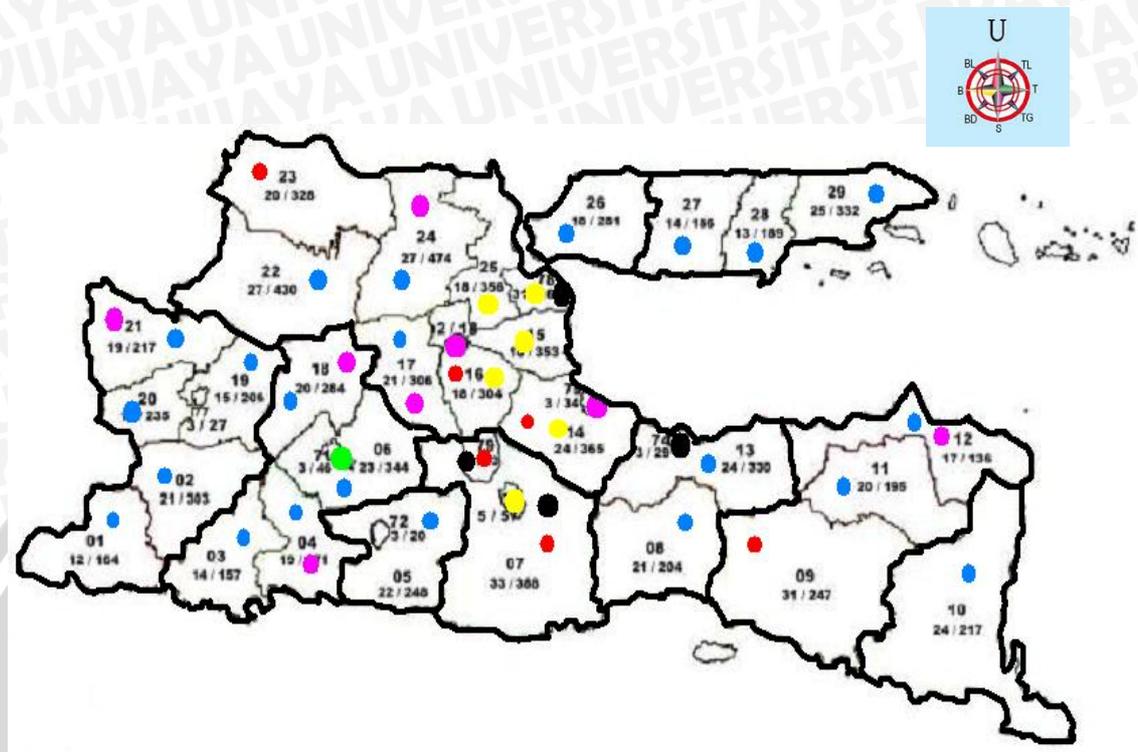
Daerah tumbuh cepat tidak menjadi prioritas untuk dikembangkan, karena daerah-daerahnya sudah tumbuh cepat, dalam arti sektor basis yang dimiliki dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sehingga daerah tumbuh cepat justru diharapkan dapat menjadi *growth pole* untuk pengembangan daerah potensial. Diantara daerah-daerah tumbuh cepat, satu diantaranya merupakan daerah pusat pertumbuhan (*growth pole*). Daerah pusat pertumbuhan mempunyai peran penting dalam menggerakkan perekonomian kawasan. Yang berperan sebagai daerah pusat pertumbuhan tersebut antara lain Kota Batu yang merupakan pusat pertumbuhan untuk kawasan pertanian. Hal ini dikarenakan Kota Batu mempunyai PDRB per kapita tertinggi (Rp 5,72 juta) pada tahun 2005 diantara daerah-daerah pertanian yang tumbuh cepat. Kota Surabaya merupakan pusat pertumbuhan untuk kawasan industri dan kawasan perdagangan dengan PDRB per kapita sebesar Rp 24,33 juta pada tahun 2005 dan merupakan yang terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Kediri yang PDRB per kapitanya mencapai Rp 76,75 juta pada tahun yang sama. Penentuan daerah pusat pertumbuhan tidak didasarkan pada total nilai PDRB semata karena masih belum menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah yang sebenarnya. Jadi besaran PDRB tersebut perlu diberi penimbang yaitu jumlah penduduk, karena penduduk merupakan pelaku pembangunan yang menghasilkan output (PDRB). Sehingga besaran PDRB dipengaruhi oleh jumlah penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk akan semakin kecil besaran PDRB per kapita wilayah tersebut. Semakin tinggi PDRB per kapita suatu wilayah, semakin baik tingkat perekonomian wilayahnya, walaupun ukuran ini tidak dapat memperlihatkan kesenjangan pendapatan antar

penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini cukup memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu wilayah dalam lingkup makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan produk domestik barang dan jasa wilayah tersebut.

Hasil dari pemetaan sebelumnya akan digunakan untuk menentukan struktur pengembangan wilayah dengan menggunakan *superimpose*. Bentuk dari *superimpose* tersebut adalah seperti berikut:



Gambar 4.3: *Superimpose Sektor Basis Daerah di Jawa Timur*



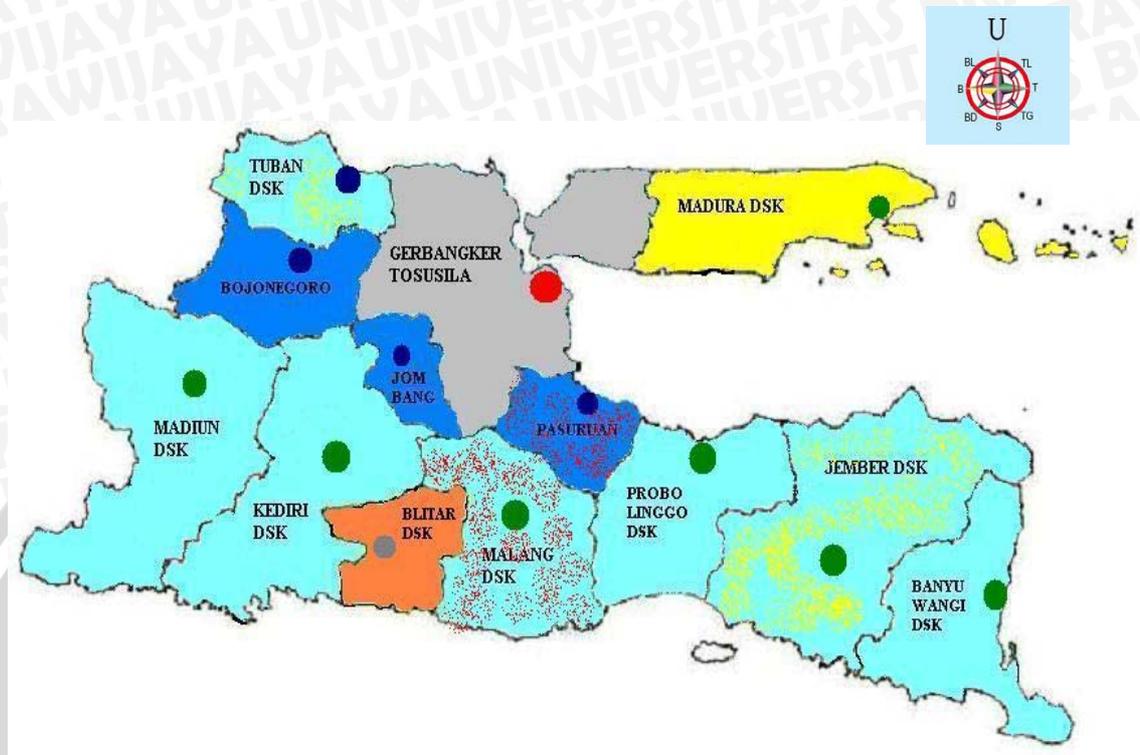
1 Pacitan	14 Pasuruan	27 Sampang
2 Ponorogo	15 Sidoarjo	28 Pamekasan
3 Trenggalek	16 Mojokerto	29 Sumenep
4 Tulungagung	17 Jombang	71 Kediri
5 Blitar	18 Nganjuk	72 Blitar
6 Kediri	19 Madiun	73 Malang
7 Malang	20 Magetan	74 Probolinggo
8 Lumajang	21 Ngawi	75 Pasuruan
9 Jember	22 Bojonegoro	76 Mojokerto
10 Banyuwangi	23 Tuban	77 Madiun
11 Bondowoso	24 Lamongan	78 Surabaya
12 Situbondo	25 Gresik	79 Batu
13 Probolinggo	26 Bangkalan	

- Daerah dengan basis pertanian yang maju
- Daerah dengan basis pertanian yang potensial
- Daerah dengan basis industri yang maju
- Daerah dengan basis industri yang potensial
- Daerah dengan basis perdagangan yang maju
- Daerah dengan basis perdagangan yang potensial

Berdasarkan gambar 4.3 diatas, maka rencana struktur perwilayahan Jawa Timur berdasarkan analisis *economic base* dapat digambarkan seperti berikut ini:



Gambar 4.4: Rencana Struktur Perwilayahan Jawa Timur Berdasarkan Analisis *Economic Base*



- Kawasan Andalan (KADAL) untuk Daerah Industri
- Kawasan Andalan (KADAL) untuk Daerah Pertanian
- Kawasan Pertanian Potensial
- Kawasan di sekitar Gerbangkertosusila
- Kawasan Tertinggal

- Orde I : Kota Surabaya
- Orde IIA : Kota Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang
- Orde IIB : Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, Kab. Sumenep
- Orde IIIA : Kota Blitar



Berdasarkan gambar 4.4 diatas, kawasan Jawa Timur meliputi Kawasan Andalan dan kawasan tertinggal. Kawasan Blitar dsk dan Madura dsk sebenarnya merupakan kawasan tertinggal, dan selebihnya merupakan Kawasan Andalan. Namun, kawasan Blitar dsk merupakan kawasan pertanian yang lebih potensial daripada kawasan Madura dsk karena Kota Blitar merupakan daerah tumbuh cepat (daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi), sedangkan daerah-daerah di kawasan Madura dsk (Kab. Sampang, Kab. Pamekasan dan Kab. Sumenep) semuanya tergolong daerah yang tertinggal (daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang rendah). Kawasan Andalan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kawasan Gerbangkertosusila, kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, dan kawasan di luar Gerbangkertosusila. Kawasan Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri. Semua kawasan di sekitar Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor pertanian, kecuali kawasan Pasuruan dsk yang pola pemanfaatannya berupa sektor industri. Kab. Bojonegoro dan Kab. Jombang dapat mensuplai bahan pangan untuk kawasan Gerbangkertosusila. Sedangkan kawasan Pasuruan dsk dapat mensuplai prasarana industri untuk kawasan Gerbangkertosusila. Daerah-daerah ini menjadi penunjang bagi kawasan Gerbangkertosusila. Semua kawasan di luar Gerbangkertosusila memiliki pola pemanfaatan berupa sektor pertanian, kecuali kawasan Malang dsk dan Tuban dsk yang merupakan *resources base* dan memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri. Kawasan Malang dsk memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri yang berbasiskan sektor pertanian. Sedangkan kawasan Tuban dsk memiliki pola pemanfaatan berupa sektor industri yang berbasiskan sektor pertambangan. Kawasan Malang dsk dapat mensuplai bahan baku industri untuk kawasan Gerbangkertosusila, khususnya dari komoditas pertaniannya. Sedangkan Kab. Tuban dapat

mensuplai komoditas pertambangannya untuk kawasan Gerbangkertosusila. Daerah-daerah ini juga menjadi penunjang bagi kawasan Gerbangkertosusila.

4.5 Analisis Kesesuaian Antara Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur Dengan Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan Analisis *Economic Base*

Untuk membahas analisis kesesuaian antara RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan analisis *economic base*, berikut akan disajikan tabel perbandingan antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base*:

Tabel 4.5: **Perbandingan Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur Dengan Struktur Pengembangan Wilayah Berdasarkan Analisis *Economic Base***

Struktur Pengembangan Wilayah	RPJMD Propinsi Jawa Timur	Analisis <i>Economic Base</i>
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Jawa Timur	Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang diperuntukkan bagi semua daerah di Jawa Timur, kecuali daerah yang berbasis pertanian.	Identifikasi daerah-daerah yang kelebihan dan kekurangan pangan, prasarana pendidikan, kesehatan, dan prasarana lainnya dengan menggunakan metode LQ dengan pendekatan ekonomi untuk mengetahui daerah yang kelebihan dan kekurangan pangan, dan metode LQ dengan pendekatan sosial untuk mengetahui daerah yang kelebihan (mencukupi) dan kekurangan prasarana pendidikan, kesehatan dan prasarana lainnya.

Struktur Pengembangan Wilayah	RPJMD Propinsi Jawa Timur	Analisis <i>Economic Base</i>
Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan	Terbentuknya rencana struktur perwilayahan Jawa Timur, dimana wilayah Jawa Timur dibagi menjadi tiga kawasan yaitu Kawasan Andalan (KADAL) yang memiliki sektor prioritas, kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, dan kawasan tertinggal.	Pembentukan daerah-daerah pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>) dengan menetapkan rencana struktur perwilayahan Jawa Timur. Rencana struktur perwilayahan Jawa Timur berdasarkan analisis <i>economic base</i> membagi wilayah Jawa Timur menjadi empat kawasan yaitu Kawasan Andalan (KADAL), kawasan di sekitar Gerbangkertosusila, kawasan pertanian potensial, dan kawasan tertinggal
Peningkatan aksesibilitas masyarakat	Penentuan orde perkotaan Jawa Timur yang didasarkan atas variabel jumlah penduduk perkotaan. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Orde I : Kota Surabaya ➤ Orde IIA : Kota Malang ➤ Orde IIB : Kota Madiun dan Kota Kediri ➤ Orde IIIA : Kota Blitar, Kab. Jember dan Kab. Pamekasan ➤ Orde IIIB : Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, Kab. Jombang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kab. Banyuwangi 	Penentuan orde perkotaan Jawa Timur yang didasarkan pada keterkaitan pembangunan daerah (aksesibilitas), arus barang antar daerah, dan pusat pertumbuhan (<i>growth pole</i>). <ul style="list-style-type: none"> ➤ Orde I : Kota Surabaya ➤ Orde IIA : Kota Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Bojonegoro, dan Kab. Jombang ➤ Orde IIB : Kota Malang, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Probolinggo, Kab. Jember, Kab. Banyuwangi, dan Kab. Sumenep ➤ Orde IIIA : Kota Blitar

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terdapat beberapa perbedaan antara struktur pengembangan wilayah berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur

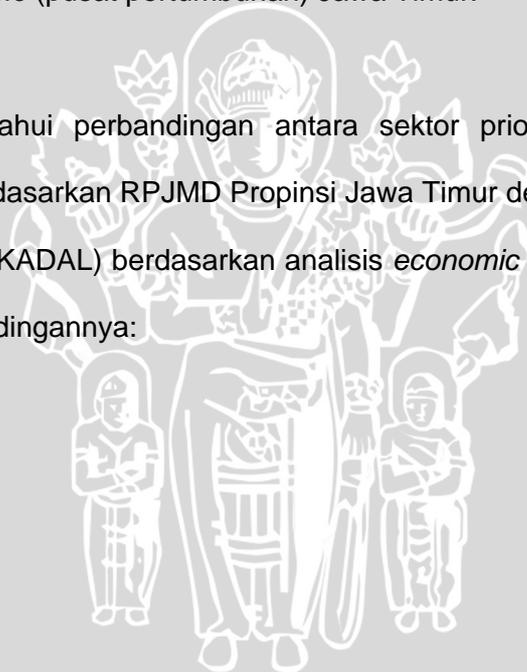
dengan struktur pengembangan wilayah berdasarkan analisis *economic base*.

Perbedaan-perbedaan tersebut antara lain:

- Berdasarkan rencana struktur perwilayahan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur, terdapat tiga kawasan di Jawa Timur antara lain: Kawasan Andalan (Gerbangkertosusila, Tuban dsk, Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Probolinggo dsk), kawasan di sekitar Gerbangkertosusila (Pasuruan dsk, Kab. Jombang, dan Kab. Bojonegoro), dan kawasan tertinggal (Blitar dsk dan Madura dsk). Sedangkan berdasarkan hasil analisis *economic base*, rencana struktur perwilayahan Jawa Timur antara lain: Kawasan Andalan (Gerbangkertosusila, Tuban dsk, Madiun dsk, Kediri dsk, Malang dsk, Jember dsk, Banyuwangi dsk, dan Probolinggo dsk), kawasan pertanian potensial (Blitar dsk), kawasan di sekitar Gerbangkertosusila (Pasuruan dsk, Kab. Jombang, dan Kab. Bojonegoro), dan kawasan tertinggal (Madura dsk). Berdasarkan analisis *economic base*, kawasan Blitar dsk tidak termasuk kawasan tertinggal, karena di kawasan tersebut terdapat daerah tumbuh cepat (daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita yang tinggi) yaitu Kota Blitar. Jika di suatu kawasan terdapat daerah tumbuh cepat, maka daerah tumbuh cepat tersebut bisa menjadi *growth pole* bagi daerah di sekitarnya. Daerah tumbuh cepat bisa memasok berbagai komoditas dari daerah di sekitarnya untuk membantu mengangkat perekonomian daerahnya, sehingga kawasan tersebut pada akhirnya akan menjadi kawasan potensial.
- Orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur yang didasarkan pada variabel jumlah penduduk ternyata tidak konsisten dan mengalami bias struktur keterkaitan antar wilayah, karena orde perkotaan menurut RPJMD Propinsi Jawa Timur tidak bisa menjelaskan keterkaitan wilayah

(aksesibilitas) dan arus barang antar daerah. Orde perkotaan berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur hanya menggunakan variabel jumlah penduduk saja, sedangkan orde perkotaan menurut analisis *economic base* tidak hanya didasarkan pada jumlah penduduk saja, tetapi juga didasarkan pada keterkaitan pembangunan daerah (aksesibilitas), arus barang antar daerah, dan pusat pertumbuhan (*growth pole*). Akan tetapi, RPJMD Propinsi Jawa Timur dan analisis *economic base* sama-sama menempatkan Kota Surabaya di orde I. Selain karena memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa Timur, Kota Surabaya juga merupakan daerah yang berbasis industri, dan berperan sebagai *growth pole* (pusat pertumbuhan) Jawa Timur.

Untuk mengetahui perbandingan antara sektor prioritas di Kawasan Andalan (KADAL) berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan sektor basis di Kawasan Andalan (KADAL) berdasarkan analisis *economic base*, berikut akan disajikan tabel perbandingannya:



Tabel 4.6: **Perbandingan Sektor Prioritas Berdasarkan RPJMD Propinsi Jawa Timur Dengan Sektor Basis Berdasarkan Analisis *Economic Base***

Kawasan Andalan (KADAL)	Sektor Prioritas	Sektor Basis
	RPJMD Propinsi Jawa Timur	Analisis <i>Economic Base</i>
Gerbangkertosusila	<ul style="list-style-type: none"> - sektor industri - sektor konstruksi - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor industri - sektor konstruksi - sektor listrik, gas dan air bersih - sektor perdagangan, hotel dan restoran - sektor pengangkutan dan komunikasi
Madiun dsk	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor penggalian - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor penggalian - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - subsektor tanaman bahan makanan - sektor konstruksi - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - sektor jasa
Kediri dsk	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor penggalian - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - subsektor perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor penggalian - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - subsektor tanaman bahan makanan - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - sektor jasa
Malang dsk	<ul style="list-style-type: none"> - subsektor tanaman perkebunan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - sektor pertanian - subsektor tanaman bahan makanan - sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> - subsektor tanaman perkebunan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - sektor perdagangan, hotel dan restoran - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - sektor jasa
Probolinggo dsk	<ul style="list-style-type: none"> - subsektor tanaman bahan makanan - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - subsektor tanaman bahan makanan - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - sektor pertanian - subsektor penggalian - sektor perdagangan, hotel dan restoran - sektor pengangkutan dan komunikasi - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - sektor jasa

Kawasan Andalan (KADAL)	Sektor Prioritas	Sektor Basis
	RPJMD Propinsi Jawa Timur	Analisis <i>Economic Base</i>
Jember dsk	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan - subsektor tanaman bahan makanan - subsektor penggalian - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan - sektor jasa
Banyuwangi dsk	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor jasa hiburan dan kebudayaan 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor tanaman perkebunan - subsektor perikanan - sektor pertambangan - subsektor tanaman bahan makanan - subsektor penggalian - sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
 Tuban dsk	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor perikanan - subsektor penggalian - subsektor tanaman perkebunan - sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> - sektor pertanian - subsektor perikanan - subsektor penggalian - subsektor tanaman bahan makanan - sektor pertambangan - sektor listrik, gas dan air bersih - sektor konstruksi

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, dapat diketahui bahwa sektor basis yang diakomodasi di dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam penentuan sektor prioritas di Kawasan Andalan meliputi sektor pertanian; sektor pertambangan dan penggalian; sektor industri pengolahan; sektor konstruksi; dan sektor jasa.

Sedangkan sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor yang berbasis *utility* (sektor listrik, gas dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan) tidak diakomodasi di dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur, khususnya dalam penentuan sektor prioritas di Kawasan Andalan karena output dari sektor-

sektor tersebut tidak bisa diekspor dan outputnya hanya untuk memenuhi kebutuhan di dalam suatu daerah saja, sehingga sektor-sektor tersebut tidak diakomodasi.

Berdasarkan perbandingan struktur pengembangan wilayah dan sektor basis antara RPJMD Propinsi Jawa Timur dengan analisis *economic base* diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan antara hasil identifikasi RPJMD Propinsi Jawa Timur dan hasil analisis *economic base* yang ada (khususnya dalam menentukan struktur pengembangan wilayah) tidak terlalu menonjol. Hal ini berarti pertimbangan faktor ekonomi dalam penyusunan RPJMD Propinsi Jawa Timur ternyata lebih besar (dominan) daripada faktor sosial, politik dan kepentingan (*interests*). Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan ekonomi (RPJMD) Propinsi Jawa Timur sudah mempertimbangkan peranan faktor ekonomi khususnya sektor basis daerah dalam penyusunannya.

